J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.2, Februari 2025

Efektivitas Pengadaan Aset Kendaraan Dinas Operasional di Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang

Annisa Wulandari[1], Bayu Priambodo[2]
[1,2]Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
E-mail: 22041010280@student.upnjatim.ac.id[1], bayu.p.adneg@upnjatim.ac.id[2]

Article History:
Received: 11 Desember 2024
Revised: 02 Januari 2025
Accepted: 07 Januari 2025

Keywords: *Effectiveness, Official Vehicle Procurement*

Abstract: *This study aims to determine the effectiveness of operational official vehicle procurement at the Regional Secretariat of Jombang Regency based on the suitability of needs, quality, quantity, and implementation time, as well as its contribution to the smooth execution of government duties and public services. A descriptive qualitative approach was used in this study, with data collected through interviews. The effectiveness of operational official vehicle procurement at the Regional Secretariat of Jombang Regency was analyzed using Sudarmayanti's effectiveness theory, which consists of three indicators. The results show that the procurement of official vehicles at the Regional Secretariat of Jombang Regency has met high-quality standards in accordance with the Regional-Owned Goods Needs Plan (RKBMD). The procurement process adheres to the principles of efficiency, transparency, and accountability, following Presidential Regulation No. 12 of 2021. The effectiveness of the procurement is evident from vehicles that meet high technical specifications, the quantity aligned with operational needs, and timely execution to support the new government in 2025. This reflects the regional government's dedication to implementing professional, effective, and sustainable governance.*

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah saat ini harus dapat menjalankan tata kelola dan standar akuntansi yang baik untuk mencapai keterbukaan dan akuntabilitas. Penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai termasuk potensi serta aset yang dimiliki oleh pemerintah (Maulidiah, 2020). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 khususnya Pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab serta dilakukan dengan rasa keadilan dan kepatutan. Ketentuan tersebut secara implisit mengharuskan pemerintah daerah untuk berhati-hati dalam mengelola anggaran daerah. Pengelolaan yang hati-hati akan memastikan bahwa daerah tetap stabil secara finansial sehingga

tidak terlibat dalam masalah keuangan yang dapat menghambat pembangunan di masa depan.

Salah satu tindakan yang diperlukan untuk mengimplementasikan efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah penyediaan infrastruktur yang dilakukan melalui pengadaan barang dan jasa. Hal ini berkaitan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian, Lembaga, atau Perangkat Daerah dengan pendanaan dari APBN atau APBD, yang mencakup seluruh proses mulai dari identifikasi kebutuhan hingga penyerahan hasil pekerjaan. Kegiatan ini memiliki peran krusial dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional dan daerah. Selain itu, pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah juga berdampak signifikan pada optimalisasi pemanfaatan anggaran negara (Lestari et al., 2020)**.** Penekanannya adalah pada tujuan yang ingin dicapai dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang meliputi: efisiensi yaitu mempercepat proses pengadaan dan memangkas biaya-biaya yang tidak perlu dan efektivitas yaitu memastikan bahwa barang/jasa yang dibeli sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi yang telah ditetapkan.

Pengadaan aset kendaraan dinas operasional merupakan komponen penting dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan dengan baik (Ekonomika et al., 2023). Di Kabupaten Jombang, banyak entitas pemerintah yang menggunakan kendaraan dinas untuk mendukung kegiatan kedinasan termasuk operasional sehari-hari, pengawasan, pelayanan publik, dan transportasi pejabat daerah. Dengan fungsi yang sangat penting tersebut, kendaraan dinas operasional merupakan aset yang harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan manfaat yang maksimal, efisiensi biaya, dan membantu tercapainya tujuan tata kelola pemerintahan yang baik.

Namun pada kenyataannya, pengadaan kendaraan operasional sering kali menghadapi masalah seperti pemborosan anggaran, pemeliharaan yang tidak optimal, dan bahkan penyalahgunaan aset. Kendaraan yang tidak dikelola dengan baik dapat meningkatkan pengeluaran operasional yang tidak sesuai dengan anggaran sehingga mengganggu alokasi anggaran untuk kegiatan operasional pemerintah lainnya. Oleh karena itu, pengadaan aset kendaraan dinas yang efisien berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan diperlukan untuk menjamin sumber daya pemerintah daerah digunakan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan (Ekonomika et al., 2023).

Sebagai panduan untuk merencanakan, mengalokasikan, dan mengendalikan biaya operasional, standar biaya umum merupakan salah satu alat utama dalam manajemen aset pemerintah daerah. Pemerintah pusat atau daerah menetapkan kriteria biaya umum yang menetapkan batasan biaya yang dapat diterima untuk manajemen aset, termasuk mobil operasional. Tujuan dari penerapan kriteria biaya umum adalah untuk memastikan bahwa pengeluaran kendaraan dinas, seperti bensin, perawatan, dan biaya operasional lainnya dapat dikelola dan sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan.

Sebagai lembaga pemerintah yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kegiatan administrasi dan pembangunan di seluruh daerah, Sekretariat Daerah Jombang tentu masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengadaan aset kendaraan dinas. Fokus utama pengadaan kendaraan dinas adalah untuk memastikan efektivitas operasional. Meskipun demikian, efektivitas pengadaan kendaraan dinas di Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang masih perlu dianalisis secara mendalam guna menilai apakah pengadaan kendaraan operasional tersebut memberikan manfaat yang optimal atau tidak.

Efektivitas aset kendaraan dinas di Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang perlu dievaluasi

dari berbagai aspek, seperti biaya operasional, ketersediaan kendaraan, pemeliharaan, serta dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik. Analisis terhadap sistem pengadaan kendaraan dinas juga penting untuk memahami berbagai manfaat, termasuk efisiensi dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya pemerintah. Diharapkan dengan menganalisis kelebihan dan kekurangan pengadaan kendaraan dinas operasional ini, pemerintah dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan strategis dalam proses pemindahtanganan aset di masa mendatang.

Dalam praktik efektivitas pengadaan aset kendaraan operasional dinas di Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang ini dapat dilihat melalui teori efektivitas dari Sudarmayanti (2009:72) dalam (Hermawan, 2009)**.** Dalam teori tersebut, terbagi tiga indikator untuk melakukan pengukuran efektivitas. *Pertama,* kualitas adalah ukuran pemenuhan persyaratan, spesifikasi, dan harapan secara optimal, mencakup kepuasan pengguna, kesesuaian tujuan, dan efisiensi proses. Kualitas tinggi mencerminkan keberhasilan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta kemampuan melebihi harapan. *Kedua,* kuantitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana tugas yang diselesaikan sesuai dengan target. Ini mencakup kemampuan menyelesaikan tugas dalam waktu yang ditentukan dan mengelola beban kerja secara efisien. Peningkatan kuantitas mencerminkan produktivitas tinggi, penting untuk mencapai tujuan jangka pendek dan panjang, serta mendukung pencapaian hasil optimal dalam organisasi atau proyek. *Ketiga,* waktu adalah acuan untuk menyelesaikan tugas dalam periode tertentu, yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pencapaian hasil. Pengelolaan waktu yang baik memastikan tugas diselesaikan sesuai prioritas dan tenggat waktu, mendukung kelancaran operasional dan pencapaian tujuan, serta meningkatkan produktivitas secara optimal.

Dalam menilai efektivitas pengadaan kendaraan dinas operasional, hal ini dapat dilihat dari penelitian terdahulu yang memfokuskan penelitiannya pada keefektivitasannya. (Santi et al., 2020) melihat bagaimana Analisis Sistem Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Pemerintah Melalui Sistem Pembelian dan Sewa (Studi Pada Politeknik Negeri Padang). Penelitian ini mengungkapkan bahwa metode pembelian tunai lebih hemat biaya dibandingkan dengan leasing dan sewa untuk semua jenis kendaraan termasuk deluxe, standar, dan operasional. Temuan tersebut menekankan pentingnya analisis biaya-manfaat dalam memastikan efisiensi anggaran dan pengambilan keputusan yang tepat dalam pengadaan. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan oleh pemerintah dalam menentukan sistem pengadaan kendaraan yang optimal untuk mendukung kegiatan operasional instansi pemerintahan. (Arifin & Biswan, 2020) melihat bahwa Penelitian yang dilakukan oleh Zanuar Arifin dan Ali Tafriji Biswan (2020) mengkaji pengambilan keputusan manajerial terkait pengadaan kendaraan dinas di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Studi ini membandingkan opsi pembelian dan sewa menggunakan pendekatan Total Cost of Ownership (TCO) dan Net Present Value (NPV). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelian kendaraan lebih hemat dalam kondisi normal meskipun sewa tetap dapat dipertimbangkan pada situasi tertentu. Penelitian ini memberikan panduan praktis dalam menentukan pilihan pengadaan kendaraan yang optimal dengan memperhatikan efisiensi anggaran serta pengelolaan aset secara efektif. Penelitian oleh (Mahardika, A. , Fahrezi, 2021) mengkaji efektivitas perencanaan program pengadaan sarana dan prasarana angkutan umum dalam mendukung Kota Medan menjadi kota metropolitan. Hasil penelitian menemukan bahwa pengadaan tersebut belum berjalan efektif. Penelitian ini menekankan pentingnya perencanaan yang terstruktur, analisis situasi, serta pengawasan yang lebih baik untuk meningkatkan efektivitas dan mendukung tujuan pembangunan kota.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memahami terkait Efektivitas Pengadaan Aset Kendaraan Dinas Operasional di Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang. Pengambilan data dengan cara wawancara dengan informan yaitu analis kebijakan ahli muda pada bagian administrasi pembangunan untuk memperoleh gambaran pengadaan kendaraan dinas operasional. Data yang diperoleh selanjutnya akan dijelaskan dengan menghubungkan pada teori yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengadaan Kendaraan Dinas

Pengadaan kendaraan operasional dinas memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran berbagai aktivitas pemerintahan, terutama pada tingkat daerah. Di Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, efektivitas pengadaan kendaraan dinas menjadi faktor utama untuk menjamin penyelenggaraan pelayanan publik yang optimal, efisien, dan tepat waktu. Kegiatan pengadaan ini tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kendaraan sesuai dengan spesifikasi dan jumlah yang telah direncanakan, tetapi juga untuk memastikan prosesnya berjalan sesuai dengan prinsip efisiensi anggaran, transparansi, dan akuntabilitas.

Pengadaan kendaraan dinas operasional di Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 yang merupakan perubahan dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan ini menjadi landasan hukum yang kokoh untuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah termasuk kendaraan dinas. Selain itu, Perpres Nomor 12 Tahun 2021 menekankan pentingnya strategi pengadaan yang didasarkan pada kebutuhan nyata serta pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan efisiensi dan keakuratan data dalam setiap prosesnya.

Efektivitas Pengadaan Kendaraan Dinas

Untuk mengevaluasi sejauh mana pengadaan kendaraan dinas operasional di Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang dapat dianggap efektif, penting untuk merujuk pada teori efektivitas yang dikemukakan oleh Sudarmayanti (2009:73). Teori ini menyatakan bahwa efektivitas diukur berdasarkan pencapaian tujuan yang telah ditentukan, serta kemampuan dalam menghasilkan output yang memenuhi harapan terkait kualitas, kuantitas, dan waktu.

Berdasarkan dari hasil wawancara dan pengumpulan data, efektivitas pengadaan kedaraan, dapat diukur dengan indikator berikut:

a. Kualitas

Kendaraan yang direncanakan untuk diadakan telah disesuaikan dengan standar kualitas tinggi berdasarkan spesifikasi teknis yang dibutuhkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang. Setiap kendaraan dirancang untuk memberikan dukungan optimal dalam operasional sehari-hari dengan tingkat keandalan dan kinerja yang memenuhi harapan pengguna. Spesifikasi teknis ini mencakup berbagai aspek penting seperti, kapasitas mesin yang memadai, efisiensi konsumsi bahan bakar, daya tahan yang tinggi, serta fitur keselamatan yang lengkap. Dengan demikian, kendaraan tersebut tidak hanya mampu menunjang tugas-tugas pemerintahan, tetapi juga memperhatikan kenyamanan dalam penggunaannya.

Semua persyaratan teknis dan kebutuhan ini dirumuskan berdasarkan data kebutuhan aktual yang tercatat dalam dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD). Dokumen ini menjadi pedoman utama dalam menentukan jenis, jumlah, dan kualitas kendaraan yang dibutuhkan dengan mempertimbangkan fungsi spesifik dan beban kerja yang harus

didukung oleh masing-masing unit kerja di Sekretariat Daerah.

Perumusan spesifikasi teknis dilakukan melalui analisis mendalam yang melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk tim teknis dan calon pengguna kendaraan untuk memastikan bahwa kendaraan yang diadakan sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan operasional dan harapan pengguna. Selain itu, pengadaan juga memperhatikan berbagai faktor tambahan, seperti efisiensi dalam biaya pemeliharaan, umur ekonomis kendaraan, serta kesesuaian dengan kondisi jalan di wilayah operasional.

Dengan berpedoman pada dokumen RKBMD dan menjalani proses pengadaan yang terencana dengan baik, kendaraan yang diadakan tidak hanya memenuhi syarat administratif, tetapi juga dirancang untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dengan efisiensi, keandalan, dan kenyamanan yang optimal. Hal ini menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan aset yang berkualitas untuk mendukung pelayanan publik yang efektif, profesional, dan berkelanjutan.

b. Kuantitas

Kendaraan dinas operasional di Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang telah memenuhi jumlah yang dibutuhkan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun karena pengadaannya telah sepenuhnya terintegrasi dalam Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD). Dokumen RKBMD ini berperan sebagai alat perencanaan strategis yang disusun berdasarkan analisis kebutuhan nyata operasional pemerintahan dengan tetap mempertimbangkan efisiensi anggaran serta penerapan prinsip pengelolaan aset yang efektif.

Tahapan proses ini diawali dengan identifikasi kebutuhan kendaraan dinas yang dilakukan secara mendetail oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah. Data kebutuhan yang telah dikumpulkan kemudian dirumuskan dan dimasukkan ke dalam RKBMD yang menjadi acuan dalam perancangan anggaran dan penentuan spesifikasi teknis kendaraan yang akan diadakan. Dengan pendekatan ini, pengadaan kendaraan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi jumlah kebutuhan tetapi juga memastikan bahwa kendaraan yang diadakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan operasional setiap unit kerja.

Selain itu, integrasi pengadaan kendaraan dinas ke dalam RKBMD menunjukkan adanya hubungan yang harmonis antara proses perencanaan strategis dan implementasi di lapangan. Penyusunan RKBMD dilakukan dengan memperhatikan prioritas pemerintah daerah, keterbatasan anggaran, serta kebijakan yang berlaku. Pendekatan ini memastikan bahwa pengadaan kendaraan dilakukan secara terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga mampu meminimalkan risiko pengadaan yang tidak sesuai kebutuhan maupun pemborosan anggaran.

Dengan adanya perencanaan yang komprehensif melalui RKBMD, pengadaan kendaraan dinas operasional di Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang tidak hanya memenuhi aspek kuantitas tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Upaya ini mencerminkan dedikasi pemerintah daerah dalam mengelola aset secara profesional untuk mendukung kelancaran operasional pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

c. Waktu

Pengadaan kendaraan dinas operasional di Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang telah dirancang dan dilaksanakan dengan cermat, sesuai dengan jadwal yang telah disusun secara terperinci. Upaya ini merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk mendukung

kesinambungan pemerintahan di bawah kepemimpinan Bupati Jombang yang akan menjabat pada periode 2025-2030. Proses persiapannya dimulai sejak tahun 2024, dengan tujuan memastikan bahwa kendaraan dinas operasional siap digunakan tepat waktu, sebelum masa jabatan Bupati baru dimulai pada awal tahun 2025.

Kendaraan dinas yang disiapkan tidak hanya difokuskan untuk memenuhi kebutuhan administratif semata, tetapi juga dirancang untuk mendukung kelancaran operasional pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Tahapan pengadaan dilakukan dengan perencanaan yang rinci, meliputi analisis kebutuhan kendaraan, penentuan spesifikasi teknis yang sesuai dengan fungsi operasional, hingga pemilihan penyedia yang memiliki kredibilitas dan kualitas tinggi. Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan bahwa kendaraan yang diperoleh tidak hanya memenuhi standar kualitas, tetapi juga mampu berfungsi secara optimal dalam mendukung berbagai tugas pemerintahan.

Selain itu, pengadaan ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), seperti efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset. Dengan tersedianya kendaraan dinas yang memadai, Bupati baru yang akan memulai masa jabatan pada tahun 2025 dapat langsung melaksanakan tugas-tugasnya tanpa menghadapi kendala terkait fasilitas transportasi. Hal ini memungkinkan pelayanan publik berjalan lancar dan efektif sejak awal masa pemerintahan.

Pengadaan ini juga mencerminkan antisipasi pemerintah daerah terhadap kebutuhan jangka panjang, sekaligus menunjukkan keseriusan dalam mendukung keberlangsungan pemerintahan yang efisien, terorganisir, dan profesional. Dengan demikian, pengadaan kendaraan dinas ini tidak hanya dirancang untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berkelanjutan di Kabupaten Jombang.

KESIMPULAN

Pengadaan kendaraan dinas operasional di Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang telah dilakukan secara efektif sesuai dengan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Sudarmayanti. Keberhasilan ini terlihat dari pemenuhan kualitas kendaraan yang telah dirancang sesuai spesifikasi teknis unggul, mencakup efisiensi bahan bakar, daya tahan, dan fitur keselamatan yang didasarkan pada Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD). Jumlah kendaraan yang diadakan telah sesuai dengan kebutuhan operasional melalui perencanaan strategis yang sistematis, transparan, dan akuntabel sehingga mencegah terjadinya pemborosan anggaran. Selain itu, proses pengadaan dirancang dengan baik dan selesai tepat waktu untuk memastikan kendaraan siap digunakan sebelum masa jabatan Bupati baru dimulai pada tahun 2025. Hal ini mencerminkan dedikasi pemerintah daerah terhadap efisiensi, transparansi, dan kesinambungan pelayanan publik, serta mendukung tata kelola pemerintahan yang profesional dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

Arifin, Z., & Biswan, A. T. (2020). Pengambilan Keputusan Manajerial: Opsi sewa atau beli dalam pengadaan kendaraan dinas. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, *5*(1), 17–29. https://doi.org/10.33105/itrev.v5i1.169

Ekonomika, J., Bisnis, D., No, V., September, E., Hal, D., Riris, R., & Krisna, A. (2023). *Analisis Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Melalui Sistem Pembelian*. *3*(2), 416–422.

Hermawan, H. (2009). 6%. 1% 93%. *Efektivitas Penarikan Pajak Bumi Dan Bangunan Oleh Perangkat Desa Di Desa Pangandaran Kecamatan Pengandaran Kabupaten Pangandaran*, 150–167.

Lestari, D. Y., Kusnandar, I., & Muhafidin, D. (2020). Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Transparansi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Secara Elektronik Di Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, *7*(1), 180–193. https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/3426

Mahardika, A. , Fahrezi, I. A. (2021). *Efektivitas Perencanaan Program Pengadaan Sarana Dan Prasarana Angkutan Umum*. *1*(November), 2021. http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimsipol/article/viewFile/478/472

Maulidiah, S. (2020). Optimalisasi Pengelolaan Aset Sebagai Wujud Reformasi Birokrasi Di Daerah. *Jurnal Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, *3*(1), 233–242.

Santi, E., Wirahadi, A., Wahyu Saputra, A., Mustika, R., & Ferdawati. (2020). Analisis Sistem Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Pemerintah Melalui Sistem Pembelian dan Sewa (Studi Pada Politeknik Negeri Padang). *Akuntansi Dan Manajemen*, *15*(1), 91–101. https://doi.org/10.30630/jam.v15i1.60